

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA FAKULTAS DESAIN, HUKUM, PARIWISATA, DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI S1 HUKUM BISNIS					Kode Dokumen: 4FM-DP40103
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana Bisnis	HKB24214	Mata kuliah Wajib	T=2	P=0	3	06-08-2026
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Bidang Keilmuan		Ka PRODI	
	 Dewi Noviyanti, S.H., M.H.		 Dewi Noviyanti, S.H., M.H.		 Mashuril Anwar, S.H., M.H. 	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi etika profesi hukum, memiliki integritas, tanggung jawab, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika bisnis global.				
	CPL-2	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan berbasis data dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan hukum bisnis kontemporer di tingkat nasional dan global.				
	CPL-4	Mampu menganalisis dan memberikan solusi hukum strategis terhadap permasalahan hukum dalam aktivitas bisnis konvensional dan digital.				
	CPL-7	Mampu menerapkan hukum materiil dan formil serta melakukan argumentasi hukum dalam praktik profesi hukum dan/atau kegiatan akademik di bidang hukum bisnis.				
	CPL-8	Menguasai konsep teoritis dan regulasi hukum bisnis, termasuk hukum perusahaan, kontrak bisnis, dan tata kelola perusahaan.				
	CPL-9	Mampu memahami permasalahan hukum bisnis kontemporer baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Menguasai konsep, prinsip, perkembangan, dan kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pengaturannya dalam KUHP Baru dan KUHP Baru.				
	CPMK-2	Menganalisis batas antara risiko bisnis, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kesalahan administratif, dan tindak pidana bisnis berdasarkan hukum materiil dan hukum acara pidana.				
	CPMK-3	Mengevaluasi penerapan <i>Business Judgment Rule</i> sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pengambilan keputusan bisnis yang beritikad baik.				
	CPMK-4	Menganalisis teori, bentuk, dan penerapan pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi serta strategi mitigasi risiko pidana dalam aktivitas bisnis.				
	CPMK-5	Menganalisis implikasi KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap penegakan hukum pidana bisnis serta mekanisme penyelesaian perkara, termasuk <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA).				
	CPMK-6	Menyusun argumentasi hukum, <i>legal opinion</i> , dan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan pidana bisnis secara profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi, integritas, dan prinsip keadilan.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar MK (Sub-CPMK)					
Sub CPMK-1	Menjelaskan konsep, ruang lingkup, sejarah, karakteristik, dan perkembangan <i>Business Criminal Law</i> dalam sistem hukum Indonesia.					
Sub CPMK-2	Menganalisis kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam perspektif KUHP Baru dan KUHP Baru serta implikasinya terhadap aktivitas bisnis.					

Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1. Sejarah, Definisi, Karakteristik, dan Motivasi Tindak Pidana di Bidang Bisnis. 2. Kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif KUHP dan KUHP Baru. 3. Fenomena Keputusan Bisnis Menjadi Perkara Pidana. 4. Risiko Bisnis dan Kejahatan; Kerugian Bisnis dan Kerugian Negara. 5. Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kesalahan Administratif. 6. Penyalahgunaan Wewenang dan <i>Fraud; Mens Rea</i> dalam Keputusan Bisnis. 7. <i>Business Judgment Rule</i> : antara Risiko Bisnis dan Ancaman Kriminalisasi. 8. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus, Komisaris dan Korporasi dalam KUHP Baru. 9. Politik Hukum KUHP dan KUHP Baru terhadap Aktivitas Bisnis. 10. Keputusan Bisnis yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana; <i>Due Process of Law</i> dalam KUHP Baru. 11. Pembuktian dalam Perkara Bisnis; Hak Korporasi dalam Proses Pidana. 12. Praktik <i>Deferred Prosecution Agreement</i> di Beberapa Negara. 13. Prosedur <i>Deferred Prosecution Agreement</i> dalam KUHP Baru; Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Deferred Prosecution Agreement</i> di Indonesia. 14. Implikasi KUHP dan KUHP Baru terhadap Praktik Penegakan Hukum Bisnis.	
Pustaka/Referensi	Utama:	
	Mashuril Anwar. 2026. <i>Dari Meja Direksi Ke Meja Hijau: Membedah Batas Antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana dalam Kerangka KUHP dan KUHP Baru</i> .	
	Pendukung:	
	1. Romli Atmasasmita. 2014. <i>Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi</i> . Jakarta: Kencana. 2. Yoserwan dan Nani Mulyati. 2021. <i>Hukum Pidana Ekonomi</i> . Jakarta: Rajawali Pers. 3. Adami Chazawi. 2022. <i>Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</i> . Malang: MNC Publishing.	
Sistem Pembelajaran	Sinkronus tatap muka di kelas	
Metode Pembelajaran	<i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA)	
Dosen Pengampu	Mashuril Anwar, S.H., M.H.	
Mata kuliah syarat	Hukum Pidana	

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SubCPMK-1: Menjelaskan konsep, ruang lingkup, sejarah, karakteristik, dan perkembangan <i>Business Criminal Law</i> dalam sistem hukum Indonesia.	1. Menjelaskan konsep dan ruang lingkup <i>Business Criminal Law</i> .	Teknik: Diskusi, Penugasan Individu, Presentasi.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB:1mgx (2sksx45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Sejarah, Definisi, Karakteristik, dan Motivasi Tindak Pidana di Bidang Bisnis.	8%

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)
		2. Menganalisis sejarah dan perkembangan <i>Business Criminal Law</i> . 3. Mengidentifikasi karakteristik <i>Business Criminal Law</i> melalui studi kasus. 4. Menganalisis urgensi <i>Business Criminal Law</i> dalam aktivitas bisnis.	Kriteria: Ketepatan konsep dan ruang lingkup, ketepatan analisis perkembangan, kemampuan mengidentifikasi karakteristik melalui kasus, serta ketepatan analisis urgensi <i>Business Criminal Law</i> dalam aktivitas bisnis.				
2	SubCPMK-2: Menganalisis kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam perspektif KUHP Baru dan KUHP Baru serta implikasinya terhadap aktivitas bisnis.	1. Menjelaskan kedudukan <i>Business Criminal Law</i> ; 2. Menganalisis perubahan dan implikasi regulasi; 3. Menganalisis penerapan KUHP Baru dan KUHP Baru melalui kasus; 4. Menyusun argumentasi hukum terkait kepastian hukum dan iklim investasi.	Teknik: Diskusi, Penugasan Individu, Presentasi. Kriteria: Ketepatan konsep dan dasar hukum, kedalaman analisis perubahan dan implikasi regulasi, ketepatan penerapan hukum pada kasus, serta kualitas argumentasi hukum.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment (DIA)</i> . 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif KUHP dan KUHP Baru.	8%
3	SubCPMK-3: Menganalisis fenomena kriminalisasi keputusan bisnis melalui studi kasus serta dampaknya terhadap kepastian hukum, inovasi, dan investasi.	1. Mengidentifikasi fakta dan isu hukum kriminalisasi keputusan bisnis. 2. Menganalisis dasar dan pertimbangan hukum kriminalisasi keputusan bisnis. 3. Membedakan risiko bisnis dan tindak pidana berdasarkan kasus. 4. Menganalisis dampak kriminalisasi terhadap kepastian hukum, inovasi, dan investasi.	Teknik: Diskusi Kelompok, Presentasi, dan Tanya Jawab/Argumentasi Hukum. Kriteria: 1. Ketepatan identifikasi fakta dan isu hukum. 2. Kedalaman analisis dasar dan pertimbangan hukum. 3. Ketepatan membedakan risiko bisnis dan tindak pidana.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment (DIA)</i> . 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Fenomena Keputusan Bisnis Menjadi Perkara Pidana.	9%

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)
		5. Menyusun argumentasi dan rekomendasi hukum berdasarkan kasus.	4. Kemampuan menganalisis dampak kriminalisasi. 5. Kualitas argumentasi dan rekomendasi hukum.				
4	SubCPMK-4: Membedakan risiko bisnis, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kesalahan administratif, dan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum materiil dan hukum acara pidana.	1. Mengidentifikasi karakteristik risiko bisnis dan kejahatan; kerugian bisnis dan kerugian Negara. 2. Mengidentifikasi fakta dan isu hukum. 3. Menentukan dasar hukum yang relevan. 4. Menganalisis unsur dan konsekuensi hukum. 5. Mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan fakta kasus. 6. Menyusun argumentasi hukum.	Teknik: Analisis Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Presentasi, dan Tanya Jawab Argumentatif. Kriteria: 1. Ketepatan mengidentifikasi fakta dan isu. 2. Ketepatan membedakan unsur dan karakteristik. 3. Ketepatan penerapan hukum materiil dan formil. 4. Ketepatan klasifikasi berdasarkan fakta kasus. 5. Kualitas argumentasi; dan ketepatan kesimpulan hukum.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment (DIA)</i> . 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: Learning Management System, serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Risiko Bisnis dan Kejahatan; Kerugian Bisnis dan Kerugian Negara.	10%

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	SubCPMK-5: Menganalisis konsep <i>mens rea</i> , penyalahgunaan wewenang, dan <i>fraud</i> dalam pengambilan keputusan bisnis.	1. Menjelaskan konsep dan bentuk <i>mens rea</i> dalam hukum pidana. 2. Mengidentifikasi unsur dan bentuk <i>fraud</i>, penyalahgunaan wewenang, PMH, dan kesalahan administratif dalam aktivitas bisnis. 3. Menentukan ada atau tidaknya <i>mens rea</i> dalam keputusan bisnis.	Teknik: Analisis Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Presentasi, dan Tanya Jawab Argumentatif. Kriteria: 1. Pemahaman konsep dan bentuk <i>mens rea</i> dalam hukum pidana. 2. Kedalaman unsur dan bentuk <i>fraud</i>, penyalahgunaan wewenang, PMH, dan kesalahan administratif dalam aktivitas bisnis. 3. Analisis <i>mens rea</i> dan hubungannya dengan keputusan bisnis.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kesalahan Administratif.	12%
6	SubCPMK-6: Mengevaluasi konsep dan penerapan <i>Business Judgment Rule</i> sebagai perlindungan hukum terhadap pengurus perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis.	1. Menjelaskan penyalahgunaan wewenang dan <i>fraud</i>; <i>mens rea</i> dalam keputusan bisnis dalam kerangka <i>Business Judgment Rule</i>. 2. Mengidentifikasi unsur dan parameter penerapan <i>Business Judgment Rule</i> dalam pengambilan keputusan bisnis. 3. Menganalisis batas penerapan <i>Business Judgment Rule</i> dalam penyalahgunaan wewenang dan <i>fraud</i>; <i>mens rea</i> dalam keputusan bisnis.	Teknik: Analisis Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Presentasi, dan Tanya Jawab Argumentatif. Kriteria: 1. Pemahaman konsep dan tujuan <i>Business Judgment Rule</i>. 2. Identifikasi parameter/unsur penerapan <i>Business Judgment Rule</i> dalam pengambilan keputusan bisnis. 3. Evaluasi penerapan dan batas perlindungan <i>Business Judgment Rule</i>.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Penyalahgunaan Wewenang dan <i>Fraud</i> ; <i>Mens Rea</i> dalam Keputusan Bisnis.	11%

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	SubCPMK-7: Menganalisis teori dan bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi berdasarkan KUHP Baru.	1. Menjelaskan konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka <i>Business Judgment Rule</i> . 2. Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi berdasarkan KUHP Baru. 3. Menganalisis hubungan antara <i>Business Judgment Rule</i> dengan kedudukan dan peran pengurus/komisaris dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.	Teknik: <i>Case Base Learning</i> . Kriteria: 1. Pemahaman teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan <i>Business Judgment Rule</i> . 2. Ketepatan mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi. 3. Analisis ketentuan KUHP Baru terkait <i>Business Judgment Rule</i> dan pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. 3. <i>Policy Brief</i> , 4. Presentasi 5. Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	<i>Business Judgment Rule</i> : antara Risiko Bisnis dan Ancaman Kriminalisasi.	11%
8 (UTS)	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait Sub-CPMK 1-7	Kemampuan menganalisa dan memberikan solusi atas permasalahan hukum pidana bisnis berdasarkan Sub-CPMK 17 melalui analisis kasus, <i>legal reasoning</i> , dan penyusunan <i>legal opinion</i> atau rekomendasi hukum.	Teknik: Analisis kasus dan penyusunan argumentasi hukum. Kriteria: 1. Identifikasi fakta dan isu hukum. 2. Ketepatan penggunaan unsur dan dasar hukum. 3. <i>Analisis Business Judgment Rule</i> dan pertanggungjawaban pidana. 4. Kualitas argumentasi hukum. 5. Ketepatan solusi/rekomendasi hukum.	Ujian Tertulis di Kelas.	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Materi pertemuan 1-7.	20%

Mg Ke-	Sub CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian Pertemuan(%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	SubCPMK-8: Menganalisis politik hukum KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap penegakan hukum pidana bisnis, termasuk <i>due process of law</i> , pembuktian, dan perlindungan hak korporasi.	1. Menjelaskan arah dan tujuan politik hukum KUHP Baru terkait pertanggungjawaban Pidana Pengurus, Komisaris dan Korporasi. 2. Menganalisis penerapan prinsip <i>due process of law</i> dalam penanganan perkara pidana bisnis. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis hak korporasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 4. Menyusun argumentasi dan rekomendasi hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi korporasi.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: 1. Ketepatan mengidentifikasi fakta dan isu hukum. 2. Ketepatan memilih dan menerapkan dasar hukum. 3. Kedalaman analisis <i>due process of law</i>. 4. Memahami pembuktian dan perlindungan hak korporasi. 5. Kemampuan menyusun argumentasi dan solusi hukum berdasarkan studi kasus.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. 3. <i>Policy Brief</i>, 4. Presentasi 5. Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Pertanggungjawaban Pidana Pengurus, Komisaris dan Korporasi dalam KUHP Baru.	3%
10	SubCPMK-9: Mengevaluasi mekanisme <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korporasi serta peluang implementasinya di Indonesia.	1. Mendefinisikan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA), tujuan, dan dasar hukumnya dalam KUHP dan KUHP baru. 2. Mengidentifikasi syarat permohonan, isi perjanjian, serta alur proses DPA. 3. Membandingkan efektivitas DPA dengan pendekatan retributif konvensional dalam hal pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korporasi.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: 1. Pemahaman Politik Hukum KUHP/KUHAP Baru. 2. Pemahaman Konsep dan Mekanisme DPA. 3. Analisis Peran Aparat Penegak Hukum dalam penerapan DPA berdasarkan KUHP/KUHAP Baru. 4. Evaluasi Peluang dan Efektivitas DPA .	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). 2. Sinkronus tatap muka di kelas. 3. <i>Policy Brief</i>, 4. Presentasi 5. Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')]	Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Politik Hukum KUHP dan KUHP Baru terhadap Aktivitas Bisnis.	4%

11	SubCPMK-10: Menganalisis implikasi KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap pengurus korporasi, BUMN, badan usaha swasta, serta iklim investasi nasional.	1. Mengidentifikasi ketentuan KUHP Baru dan KUHP Baru yang berpotensi memengaruhi aktivitas korporasi. 2. Menganalisis dampak pembaharuan hukum pidana terhadap tanggung jawab dan risiko hukum pengurus korporasi. 3. Menganalisis implikasi KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap BUMN dan badan usaha swasta. 4. Mengevaluasi risiko dan peluang penerapan KUHP Baru dan KUHP Baru bagi dunia usaha.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: 1. Ketepatan mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan. 2. Kemampuan menganalisis dampak KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap pengurus, BUMN, dan badan usaha swasta. 3. Kemampuan mengevaluasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. 4. Ketepatan merumuskan rekomendasi hukum strategis berdasarkan studi kasus.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment (DIA).</i> 2. Sinkronus tatap muka di kelas. 3. <i>Policy Brief,</i> 4. Presentasi 5. Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')]	<i>Learning Management System, serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</i>	Keputusan Bisnis yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana; <i>Due Process of Law</i> dalam KUHP Baru.	8%
12	SubCPMK-11: Menyusun argumentasi hukum (<i>legal reasoning</i>) dalam menganalisis perkara pidana bisnis berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Mengidentifikasi dan memilah fakta material yang relevan dalam perkara pidana bisnis. 2. Merumuskan isu hukum berdasarkan fakta kasus. 3. Mengidentifikasi dan menilai relevansi alat bukti terhadap isu hukum dan unsur tindak pidana. 4. Menentukan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. 5. Menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berbasis fakta serta hukum.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: 1. Ketepatan mengidentifikasi fakta material dan isu hukum. 2. Kemampuan menghubungkan fakta dengan alat bukti dan ketentuan hukum yang relevan, kualitas <i>legal reasoning</i> yang logis dan sistematis. 3. Ketepatan menyusun kesimpulan dan solusi hukum berdasarkan studi kasus.	1. <i>Delivery, Interaction, Assessment (DIA).</i> 2. Sinkronus tatap muka di kelas. 3. <i>Policy Brief,</i> 4. Presentasi 5. Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')] Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System, serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</i>	Pembuktian dalam Perkara Bisnis; Hak Korporasi dalam Proses Pidana.	8%	

13	SubCPMK-11: Menyusun argumentasi hukum (<i>legal reasoning</i>) dalam menganalisis perkara pidana bisnis berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Memahami konsep DPA lintas yurisdiksi. - Mengidentifikasi syarat dan kewajiban DPA. - Mengevaluasi peluang dan tantangan DPA di Indonesia. - Menerapkan DPA dalam analisis kasus. - Menyusun argumentasi hukum.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: - Pemahaman konsep DPA lintas yurisdiksi. - Kemampuan analisis syarat, kewajiban, dan peran aparat dalam penerapan DPA. - Kedalaman evaluasi Implementasi DPA di Indonesia. - Penerapan DPA dalam kasus dan argumentasi hukum.	<i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). - Sinkronus tatap muka di kelas. <i>Policy Brief</i>, - Presentasi - Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')] Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Praktik <i>Deferred Prosecution Agreement</i> di Beberapa Negara.	8%
14	SubCPMK-12: Menyusun <i>legal opinion</i> atau rekomendasi penyelesaian perkara pidana bisnis secara profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi, integritas, dan prinsip keadilan.	- Menjelaskan prosedur pengajuan, negosiasi, dan pengesahan DPA berdasarkan KUHP Baru. - Menganalisis peluang dan tantangan DPA dengan mempertimbangkan asas legalitas, potensi penyalahgunaan, kepercayaan publik, serta perbedaan model dengan negara lain.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: - Pemahaman prosedur dan syarat DPA. - Kemampuan menganalisis peluang dan tantangan DPA di Indonesia.	<i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). - Sinkronus tatap muka di kelas. <i>Policy Brief</i>, - Presentasi - Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')] Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Prosedur <i>Deferred Prosecution Agreement</i> dalam KUHP Baru; Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Deferred Prosecution Agreement</i> di Indonesia.	8%
15	SubCPMK-12: Menyusun <i>legal opinion</i> atau rekomendasi penyelesaian perkara pidana bisnis secara profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi, integritas, dan prinsip keadilan.	Menyusun <i>legal opinion</i> dengan mengedepankan objektivitas, itikad baik, dan kepentingan publik, serta memahami risiko pertanggungjawaban atas itikad tidak baik.	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: - Kedalaman analisis fakta dan alat bukti, kualitas <i>legal reasoning</i>. - Ketepatan rekomendasi penyelesaian perkara.	<i>Delivery, Interaction, Assessment</i> (DIA). - Sinkronus tatap muka di kelas. <i>Policy Brief</i>, - Presentasi - Analisis Kasus. [PB: 1mgx (2x45'')] Perangkat TI Pendukung: <i>Learning Management System</i> , serta Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Implikasi KUHP dan KUHP Baru terhadap Praktik Penegakan Hukum Bisnis.	8%
16 (UAS)	Menyelesaikan permasalahan terkait Sub-CPMK 8-12	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana bisnis berdasarkan Sub-CPMK 8-12 melalui analisis kasus, legal reasoning, dan penyusunan	Teknik: <i>Case Base Learning.</i> Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan jawaban.	Ujian Tertulis di Kelas.	Materi pertemuan 9-15	20%

		legal opinion atau rekomendasi hukum.					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Pemetaan Bobot Sub-CPMK terhadap Komponen Penilaian

Basis Evaluasi Kognitif /Pengetahuan	Komponen Evaluasi	Sub-CPMK												Total Bobot Case Base Leraning/Team-Based Project / Total CPMK	Total Bobot Non Case Base Learning/Team-Based Project /Total CPMK
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK 9	Sub-CPMK 10	Sub-CPMK 11	Sub-CPMK 12		
Aktivitas Partisipatif	Kehadiran dan Sikap	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%				10%
Hasil proyek	Case Base Learning							2%	2%	3%	7%	8%	8%	30%	
Kognitif /Pengetahuan	Tugas	3%	3%	3%	4%	4%	3%								20%
Kognitif /Pengetahuan	Ujian Tengah Semester (UTS)	2%	2%	3%	3%	3%	3%	4%							20%
Kognitif /Pengetahuan	Ujian Akhir Semester (UAS)	2%	2%	2%	2%	4%	4%	4%							20%
Total Bobot		8%	8%	9%	10%	12%	11%	11%	3%	4%	8%	8%	8%	30%	70%
Kesimpulan Jenis Metode Pembelajaran															

Pemetaan CPL terhadap CPMK dan Penilaian

CPMK/ Kompetensi Akhir yang Ditargetkan	Bobot CPL Yang Ditunjang (%)						T. Sub CPMK	TOTAL
	CPL 1	CPL 2	CPL 4	CPL 7	CPL 8	CPL 9		
CPMK 1	2,67%	2,67%	2,66%				8%	100%
CPMK 1	2,67%	2,67%	2,66%				8%	
CPMK 1	2,66%	2,66%	2,68%				8%	
CPMK 2			3,33%			4%	7%	
CPMK 2			3,34%			4%	7%	
CPMK 2			1,75%			4%	6%	
CPMK 3						8%	8%	
CPMK 4			3,33%	3,34%		4,00%	11%	
CPMK 4			3,33%	3,33%		4,00%	11%	

CPMK 4			3,34%	3,34%		3,32%	10%
CPMK 5					4,00%	3,50%	8%
CPMK 5					3,50%		4%
CPMK 6			1,75%				2%
CPMK 6			3,50%				4%
	8%	8%	32%	10%	8%	35%	

Rubrik Penilaian Tugas

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot	Sangat Baik (90-100)	Baik (70-89)	Cukup (60-69)	Kurang (50-59)
1	Identifikasi Fakta dan Isu Hukum	15%	Fakta material dan isu hukum diidentifikasi secara lengkap, tepat, relevan, dan sistematis	Fakta dan isu hukum sebagian besar tepat dan relevan	Fakta/isu hukum teridentifikasi tetapi masih terdapat kekeliruan atau kurang lengkap	Tidak mampu mengidentifikasi fakta dan isu hukum secara tepat
2	Penguasaan Konsep dan Dasar Hukum	20%	Konsep hukum pidana bisnis dan dasar hukum dikuasai sangat baik serta digunakan secara tepat dan relevan	Konsep dan dasar hukum dikuasai dengan baik, dengan sedikit kekurangan	Penguasaan konsep/dasar hukum masih terbatas dan terdapat beberapa kekeliruan	Tidak menunjukkan penguasaan konsep dan dasar hukum yang relevan
3	Analisis dan Penerapan Hukum	25%	Mampu menganalisis fakta secara mendalam dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat, logis, kritis, dan sistematis	Analisis dan penerapan hukum tepat, tetapi belum sepenuhnya mendalam	Analisis masih deskriptif dan penerapan hukum belum konsisten	Tidak mampu menghubungkan fakta dengan ketentuan hukum
4	<i>Legal Reasoning</i> /Argumentasi Hukum	20%	Argumentasi sangat logis, sistematis, berbasis fakta, alat bukti, dan hukum serta mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat hukum	Argumentasi logis dan relevan, tetapi belum mendalam	Argumentasi cukup relevan tetapi masih lemah atau kurang sistematis	Argumentasi tidak logis, tidak sistematis, atau tidak didukung dasar hukum
5	Solusi/Rekomendasi Hukum	15%	Solusi sangat tepat, realistis, strategis, berbasis hukum, dan menjawab permasalahan secara komprehensif	Solusi tepat dan relevan, tetapi belum sepenuhnya komprehensif	Solusi cukup relevan tetapi kurang mendalam/strategis	Solusi tidak relevan atau tidak didasarkan pada analisis hukum
6	Etika Akademik dan Profesionalisme	5%	Menunjukkan integritas, objektivitas, etika profesi, penggunaan sumber yang tepat, dan bebas plagiarisme	Etika akademik dan penggunaan sumber sudah baik dengan kekurangan minor	Terdapat beberapa kekurangan dalam sitasi, objektivitas, atau etika akademik	Tidak memenuhi prinsip etika akademik/profesional

Rumus Nilai Tugas: jumlah (skor setiap dimensi × bobot masing-masing).

Rubrik Penilaian Case Based Learning

No	Kriteria	Deskripsi	Skor Maksimal
1	Kedalaman Pembahasan	▪ Menunjukkan pemahaman mendalam terhadap fakta dan konteks kasus. ▪ Menjelaskan permasalahan hukum secara sistematis dan komprehensif. ▪ Menghubungkan kasus dengan konsep/teori hukum pidana bisnis yang relevan.	20
2	Ketepatan Analisis Hukum	▪ Mengidentifikasi fakta material dan isu hukum secara tepat. ▪ Menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum yang relevan. ▪ Menerapkan hukum terhadap fakta kasus secara tepat dan konsisten.	20
3	Legal Reasoning dan Argumentasi	▪ Menyusun argumentasi hukum secara logis, sistematis, dan berbasis fakta. ▪ Menghubungkan fakta, alat bukti, unsur tindak pidana, dan dasar hukum secara tepat. ▪ Mampu mempertahankan argumentasi berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.	20
4	Analisis Penyelesaian Kasus	▪ Mampu membedakan risiko bisnis, wanprestasi, PMH, kesalahan administratif, dan tindak pidana sesuai konteks kasus. ▪ Mampu menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan/atau korporasi jika relevan. ▪ Mampu mengevaluasi penerapan <i>Business Judgment Rule</i> atau mekanisme hukum lain yang relevan.	20
5	Solusi/Rekomendasi Hukum	▪ Menyusun solusi atau rekomendasi yang tepat, realistis, dan strategis. ▪ Rekomendasi didasarkan pada hasil analisis hukum dan mampu menjawab isu utama kasus. ▪ Mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, kepentingan bisnis, dan mitigasi risiko pidana.	15
6	Presentasi, Profesionalisme, dan Etika	▪ Menyajikan hasil analisis secara jelas, sistematis, dan komunikatif. ▪ Mampu menjawab pertanyaan dan mempertanggungjawabkan argumentasi. ▪ Menunjukkan integritas, objektivitas, etika akademik/profesi, dan penggunaan sumber yang tepat.	5

Kisi-Kisi Soal Ujian Tengah Semester (UTS)

No.	CPMK	Sub-CPMK	Materi yang Diujikan	Indikator Soal	Bentuk Soal	Bobot
-----	------	----------	----------------------	----------------	-------------	-------

1	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Konsep, ruang lingkup, sejarah, karakteristik, dan perkembangan <i>Business Criminal Law</i>	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep serta karakteristik <i>Business Criminal Law</i> dalam sistem hukum Indonesia	Esai	2%
2	CPMK-1	Sub-CPMK-2	Kedudukan <i>Business Criminal Law</i> dalam KUHP Baru dan KUHP Baru	Mahasiswa mampu menganalisis perubahan regulasi dan implikasinya terhadap aktivitas bisnis	Esai berbasis kasus	2%
3	CPMK-1	Sub-CPMK-3	Kriminalisasi keputusan bisnis	Mahasiswa mampu menganalisis fakta dan dasar hukum kriminalisasi keputusan bisnis serta dampaknya terhadap kepastian hukum, inovasi, dan investasi	Analisis kasus	3%
4	CPMK-2	Sub-CPMK-4	Risiko bisnis, wanprestasi, PMH, kesalahan administratif, dan tindak pidana	Mahasiswa mampu membedakan dan mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum	Analisis kasus	3%
5	CPMK-2	Sub-CPMK-5	<i>Mens rea</i> , penyalahgunaan wewenang, dan <i>fraud</i>	Mahasiswa mampu menganalisis ada/tidaknya <i>mens rea</i> serta hubungan penyalahgunaan wewenang dan <i>fraud</i> dengan keputusan bisnis	Analisis kasus	3%
6	CPMK-3	Sub-CPMK-6	<i>Business Judgment Rule</i>	Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan dan batas perlindungan <i>Business Judgment Rule</i> terhadap pengurus perusahaan	Analisis kasus	3%
7	CPMK-4	Sub-CPMK-7	Pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi	Mahasiswa mampu menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus, komisaris, dan korporasi berdasarkan KUHP Baru	Analisis kasus	4%
Total Bobot UTS						20%

Rubrik Penilaian UTS

Rentang Nilai	Kategori	Deskripsi Ketercapaian OBE
85–100	Sangat Baik	Mampu menganalisis permasalahan hukum pidana bisnis secara mendalam, menggunakan dasar hukum secara tepat, menyusun legal reasoning yang kuat, serta menghasilkan solusi hukum yang relevan
70–84	Baik	Mampu menganalisis permasalahan dan menerapkan hukum dengan baik, tetapi kedalaman argumentasi atau solusi masih perlu ditingkatkan
55–69	Cukup	Mampu memahami dan menganalisis sebagian permasalahan, tetapi penerapan hukum, legal reasoning, atau solusi belum optimal
<55	Kurang	Belum mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum pidana bisnis secara memadai

No.	CPMK	Sub-CPMK	Materi yang Diujikan	Indikator Soal	Bentuk Soal	Bobot
1	CPMK-4	Sub-CPMK-8	Politik hukum KUHP Baru dan KUHP Baru; <i>due process of law</i> , pembuktian, dan perlindungan hak korporasi	Mahasiswa mampu menganalisis arah politik hukum KUHP Baru dan KUHP Baru serta penerapan <i>due process of law</i> , pembuktian, dan perlindungan hak korporasi dalam perkara pidana bisnis	Analisis kasus	3%
2	CPMK-5	Sub-CPMK-9	<i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA): konsep, mekanisme, peran aparat, efektivitas, peluang dan tantangan implementasi	Mahasiswa mampu mengevaluasi mekanisme DPA sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korporasi dan peluang implementasinya di Indonesia	Analisis kasus	4%
3	CPMK-5	Sub-CPMK-10	Implikasi KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap pengurus korporasi, BUMN, badan usaha swasta, dan iklim investasi	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pembaruan hukum pidana terhadap tanggung jawab dan risiko hukum pengurus, korporasi, BUMN, badan usaha swasta, serta iklim investasi nasional	Analisis kasus	5%
4	CPMK-6	Sub-CPMK-11	<i>Legal reasoning</i> , fakta material, isu hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mahasiswa mampu menyusun <i>legal reasoning</i> yang logis dan sistematis berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan	Analisis kasus	4%
5	CPMK-6	Sub-CPMK-12	<i>Legal opinion</i> /rekomendasi penyelesaian perkara pidana bisnis; etika profesi, integritas, dan prinsip keadilan	Mahasiswa mampu menyusun <i>legal opinion</i> atau rekomendasi penyelesaian perkara pidana bisnis secara profesional, objektif, dan berlandaskan hukum serta prinsip keadilan	Esai/ <i>Legal Opinion</i>	4%
Total Bobot UAS						20%

Rubrik Penilaian UAS

Rentang Nilai	Kategori	Deskripsi Ketercapaian OBE
85–100	Sangat Baik	Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun <i>legal opinion</i> secara mendalam, logis, sistematis, dan profesional
70–84	Baik	Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum dengan baik, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperdalam
55–69	Cukup	Memahami sebagian permasalahan dan mampu melakukan analisis dasar, tetapi <i>legal reasoning</i> dan rekomendasi belum optimal
<55	Kurang	Belum mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum serta belum mampu menyusun solusi/ <i>legal opinion</i> yang memadai